

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DISERTASI .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN / PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK / ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	44
1.3 Tujuan Penelitian .....	44
1.4 Manfaat Penelitian .....	45
1.5 Keaslian Penelitian .....	46
1.6 Sistematika Penulisan .....	47
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>
2.1 Landasan Teori.....	49
2.1.1 Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman .....	49
2.1.1.1 Struktur Hukum .....	51
2.1.1.2 Substansi Hukum .....	52
2.1.1.3 Budaya Hukum .....	53

2.1.2	Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch .....	63
2.1.2.1	Aspek Keadilan Hukum .....	66
2.1.2.2	Aspek Kemanfaatan Hukum.....	72
2.1.2.3	Aspek Kepastian Hukum.....	75
2.1.3	Teori Tanggung Jawab Hukum Menurut Hans Kelsen .....	82
2.2	Landasan Konseptual .....	97
2.2.1	Perlindungan Konsumen Di Indonesia .....	98
2.2.2	Kosmetika Di Indonesia.....	107
2.2.2.1	Pengertian Dan Manfaat Kosmetika .....	107
2.2.2.2	Jenis-Jenis Kosmetika.....	112
2.2.2.3	Kehalalan Kosmetika .....	115
2.2.2.4	Keamanan Kosmetika Bagi Kesehatan Konsumen.....	119
2.2.2.5	Produksi Dan Peredaran Kosmetika .....	125
2.2.2.6	Perdagangan Kosmetika.....	129
2.2.2.6.1	Pengertian Perdagangan Kosmetika .....	129
2.2.2.6.2	Pihak-Pihak Dalam Perdagangan Kosmetika .....	132
2.2.2.7	Bahan Berbahaya Pada Kosmetika.....	137

2.2.3	Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Kosmetika Di Indonesia.....	144
2.2.4	Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Indonesia.....	150
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>161</b>
3.1	Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	161
3.1.1	Jenis Penelitian.....	161
3.1.2	Pendekatan Penelitian.....	164
3.2	Objek Penelitian Dan Lokasi Penelitian.....	165
3.2.1	Objek Penelitian.....	165
3.2.2	Lokasi Penelitian.....	168
3.3	Jenis Data.....	168
3.4	Teknik Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data Serta Analisa Data.....	174
3.4.1	Teknik Pengumpulan Data.....	174
3.4.2	Teknik Pengolahan Data.....	177
3.4.3	Teknik Analisa Data.....	177
3.5	Penarikan Kesimpulan.....	179
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN DAN ANALISA .....</b>	<b>180</b>
4.1	Norma Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Terkait Perdagangan Kosmetika Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia .....	180

4.1.1	Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Kosmetika Ditinjau Dari KUHPerdara .....	180
4.1.2	Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Kosmetika Ditinjau Dari KUHPidana .....	194
4.1.3	Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	202
4.1.4	Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .....	225
4.1.5	Studi Perbandingan Kebijakan Produksi Dan Perdagangan Kosmetika Di Lima Negara .....	232
4.1.5.1	Amerika Serikat .....	232
4.1.5.2	Korea Selatan.....	252
4.1.5.3	China .....	263
4.1.5.4	Jepang.....	273
4.1.5.5	Perancis .....	277
4.2	Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perdagangan Kosmetika Yang Aman Dari Bahan Berbahaya .....	283
4.2.1	Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perdagangan Kosmetika Yang Aman.....	283

4.2.2	Implementasi Terhadap Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Kosmetika .....	320
4.2.3	Implementasi Perdagangan Kosmetika Yang Aman Bagi Kesehatan Konsumen Berdasarkan Persyaratan Untuk Menjamin Mutu, Keamanan Dan Kemanfaatan.....	326
4.2.4	Kasus Kosmetika Berbahaya Di Indonesia.....	342
4.2.4.1	Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PT.PBR..	342
4.2.4.2	Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2020/PN.Sby.	344
4.2.4.3	Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2020/PN.Btm...	347
4.2.4.4	Kasus YLKI Di Gorontalo Pada Tahun 2018.....	351
4.2.5	Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perdagangan Kosmetika Yang Mengandung Bahan Berbahaya .....	356
4.3	Rekonstruksi Pengaturan Yang Ideal Untuk Melindungi Konsumen Dari Perdagangan Kosmetika Yang Mengandung Bahan Berbahaya .....	370
4.3.1	Kelemahan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia.....	370
4.3.1.1	Kelemahan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	370

4.3.1.2.	Kelemahan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	373
4.3.1.3.	Kelemahan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Badan POM) .....	374
4.3.2	Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia.....	379
4.3.3	Penguatan Budaya Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Kosmetika Yang Mengandung Bahan Berbahaya .....	387
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>404</b>
5.1	Kesimpulan .....	404
5.2	Saran.....	407

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jenis Perizinan Di Bidang Kosmetika .....	298
Tabel 4.2 Golongan Izin Produksi Kosmetika .....	300
Tabel 4.3 Kosmetika Yang Mengandung Bahan Berbahaya .....	303



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Diagram Alur Perizinan Izin Produksi Kosmetika.....	330
Gambar 4.2 Diagram Alur Prosedur Pendaftaran Badan Usaha .....	335
Gambar 4.3 Diagram Alur Prosedur Notifikasi.....	336
Gambar 4.4 Pihak Pemohon Notifikasi.....	337

